

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan indikator utama dari keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan ditandai dengan adanya sistem keuangan yang stabil dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, lembaga keuangan memegang peranan penting melalui fungsi intermediasinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan mencapai stabilitas sistem keuangan. Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang memerlukan peran dari seluruh pihak dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, sehingga ketika perekonomian mulai tumbuh maka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran akan semakin berkurang (Klasen, 2017).

Inklusi keuangan menjadi salah satu syarat dari pertumbuhan inklusif yang menjadi faktor penentu kesuksesan pembangunan sebuah negara. Negara – negara di Asia mulai menerapkan program inklusi keuangan yang berfokus pada peningkatan akses sehingga mampu menjangkau sebanyak mungkin masyarakat yang belum pernah merasakan manfaat dari layanan keuangan formal karena adanya hambatan akses (Dienillah & Anggraeni, 2016). Sektor keuangan yang berkembang pesat tidak serta merta memberikan akses keuangan secara penuh, masih terdapat hambatan dan keterbatasan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap operasional lembaga keuangan dan ketidaksesuaian antara produk yang ditawarkan dengan

kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah. Padahal, akses terhadap layanan keuangan merupakan syarat penting bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam sistem perekonomian. Peluang masyarakat untuk mengakses dan menggunakan layanan keuangan juga mencerminkan tingkat inklusi keuangan dalam perekonomian. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh bank dunia, di berbagai negara mendapatkan bahwa keterlibatan inklusi keuangan berperan penting dalam mengentas kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Muhadjir, 2015)

Inklusi keuangan menjadi tren setelah krisis tahun 2008 yang didasari dampak krisis pada kelompok *in the bottom of the pyramid (low and irregular income, living in remote areas, disabled people, workers who do not have legal identity documents, and marginalized communities)*. Kemudian, pada tahun 2012 *financial inclusion* diperkenalkan pada Leaders Summit di Los Cabos, Meksiko, G20 meluncurkan *Financial Peer Learning Program (FPLP)* dan *Global Partnership on Financial Inclusion (GPFI)* sebagai bentuk promosi dan penerbitan keuangan inklusif (Wulandari, 2019). Usaha memperkuat keuangan juga disertai dengan diterbitkannya *9 Principles for Innovative Financial Inclusion* yang mendasari aturan pengembangan keuangan inklusif, mencakup *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework*. Sejak saat itu, muncul berbagai forum internasional terkait keuangan yang terus fokus melakukan kegiatan terkait inklusi keuangan, termasuk negara berkembang seperti Indonesia

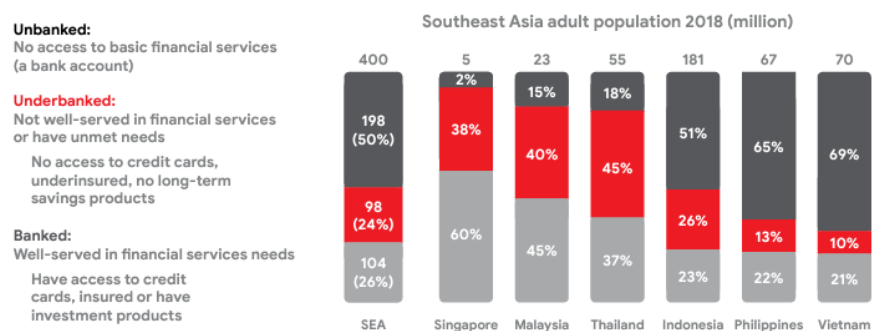
melalui peran Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan nasional (Rusdianasari, 2018)

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara turut menyusun strategi nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan stabilisasi sistem keuangan melalui inklusi keuangan. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, diperlukan pendalaman sektor keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, agar setiap orang dapat mengakses layanan keuangan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja sektor keuangan, Indonesia telah menerapkan sejumlah strategi untuk mencapai hal tersebut, termasuk memperluas inovasi produk keuangan, solusi pembayaran alternatif, dan pengembangan fasilitas infrastruktur jasa keuangan (Sanjaya & Nursechafia, 2016).

Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI menjadi landasan hukum serta pedoman untuk melakukan program keuangan inklusif di Indonesia sehingga dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan menjadi pedoman langkah – langkah strategis lembaga terkait untuk terus mewujudkan keuangan inklusif dengan tiga pilar, yakni pemberdayaan ekonomi, perluasan akses, literasi keuangan, dan harmonisasi kebijakan (Bank Indonesia, 2023).

Finansial eksklusif merupakan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan

tingkat *financial exclusion* yang cukup tinggi. Hal tersebut dilihat dari sejumlah hasil survei yang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir yang menunjukkan bahwa akses finansial di Indonesia masih belum baik. Global Findex Database tahun 2017 mencatat secara global, sekitar 1,7 miliar orang dewasa tidak memiliki rekening bank di lembaga keuangan. Kepemilikan rekening di negara – negara dengan penghasilan tinggi hampir bersifat universal, sedangkan di negara - negara berkembang masih terdapat banyak orang dewasa yang tidak memiliki rekening bank. Sebanyak 57% orang di negara berkembang tidak memiliki rekening tabungan. Menurut data *World Bank* Tahun 2018 Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki populasi *unbanked* sebesar 95 juta orang (Andariesta, 2023).



Gambar 1. 1 SEA Adult Population

Sumber: TEMASEK (2019)

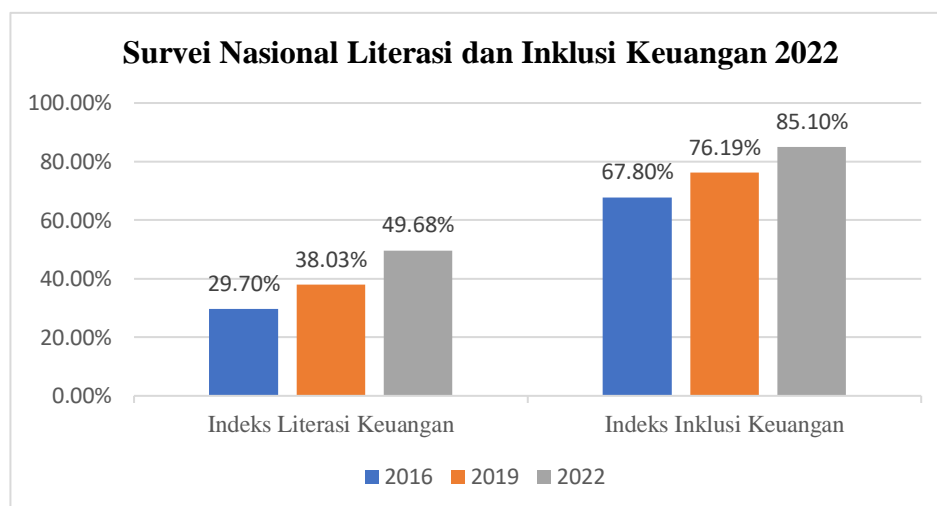
Hal serupa juga didukung oleh data yang diperoleh dari (TEMASEK, 2019) yang menunjukkan bahwa Indonesia dengan jumlah orang dewasa sebanyak 181 juta jiwa, hanya 42 juta jiwa yang memiliki akses penuh terhadap layanan keuangan seperti akses kartu kredit, asuransi, dan produk investasi atau tergolong “*banked*”. Sebanyak 47 juta jiwa tergolong *underbanked* atau

memiliki rekening bank namun tidak dapat mengakses kartu kredit, produk investasi, dan asuransi. Sementara sisanya, yakni sejumlah 92 juta tergolong *underbanked* atau tidak memiliki rekening dan tidak dapat mengakses layanan keuangan. Bank Indonesia mengemukakan bahwa terdapat beberapa penyebab tingginya tingkat “*unbanked*” di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari sisi supply dan demand, yaitu penyedia jasa dan masyarakat. Sehingga terjadinya “*unbanked*” disebabkan oleh adanya *channel barrier* (sarana yang tidak sesuai), *price barrier* (tingginya biaya), dan *design product barrier* (produk yang tidak cocok) baik dari sisi *supply* (penyedia jasa keuangan) maupun sisi *demand* (masyarakat pengguna layanan keuangan) (Bank Indonesia, 2021)

Bank dan sejumlah lembaga non-bank pun mulai menawarkan layanan keuangan digital bagi masyarakat. Inklusi keuangan digital adalah salah satu program keuangan inklusif. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong inklusi keuangan dengan memanfaatkan teknologi digital. Teknologi digital dapat dipercaya dan dianggap mampu meningkatkan inklusi keuangan global. *Digital financial inclusion* (DFI) berkaitan dengan penerapan sarana digital yang dapat menghemat biaya untuk menjangkau masyarakat yang terhambat dalam mendapatkan akses layanan keuangan dengan serangkaian layanan keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan membentuk Grup Inovasi Keuangan Digital untuk memanfaatkan fintech dalam menginovasikan produk dan layanan keuangan. Realisasi dari DFI adalah aktivitas layanan sistem pembayaran dan/atau layanan keuangan formal terbatas yang dilakukan tanpa melalui kantor fisik,

tetapi dengan menggunakan sarana teknologi termasuk *mobile based*, dan *web based*, serta pihak ketiga atau agen.

Layanan keuangan digital telah diterapkan oleh lebih dari 80 negara, salah satunya Indonesia dan beberapa di antaranya telah mencapai skala yang signifikan. Dengan adanya inklusi keuangan digital, sebagian masyarakat yang sebelumnya terhambat dalam mengakses layanan keuangan kini dapat merasakan manfaat dari layanan jasa keuangan. Negara dengan inklusi keuangan yang baik cenderung akan terbebas dari hambatan dalam mengakses layanan keuangan, termasuk dengan melibatkan infrastruktur dan teknologi di dalamnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi *stakeholder* dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara lokal.



Gambar 1. 2 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) keempat yang dilakukan pada tahun 2022 menjelaskan bahwa *financial literacy index* penduduk

Indonesia sebanyak 49,68% dan *financial inclusion index* mencapai 85,10%. Dapat dilihat bahwa dalam jangka waktu 3 tahun, pemahaman dan akses terhadap keuangan masyarakat mengalami peningkatan, dari tahun 2019 hingga 2022 meningkat sebesar 11,65%, dan 8,91%. Namun, dengan adanya *digital financial inclusion* angka tersebut masih tergolong rendah apabila melihat data menurut Global Financial Index 2021, negara lain dengan indeks inklusi keuangan masing-masing, seperti Malaysia 88,37%, Singapura 97,55%, dan Thailand 95,58%.

Literasi keuangan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan pihak yang berkaitan harus memperhatikan bahwa Indonesia termasuk dalam kategori rendahnya tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan karena hadirnya inklusi keuangan digital belum dapat sepenuhnya mengatasi masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses layanan jasa keuangan (keuangan eksklusif). Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, indeks inklusi keuangan di DKI Jakarta dan Jawa Barat mencapai 96,62% dan 88,31% serta literasi keuangan masing-masing sebesar 52,99% dan 55,61%. Data tersebut menunjukkan tingkat inklusi keuangan lebih tinggi dari tingkat literasi, adanya *gap* yang cukup tinggi antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan mengindikasikan bahwa masyarakat lebih banyak menggunakan produk dan layanan keuangan tanpa memiliki pengetahuan yang baik dalam mengakses produk dan layanan keuangan.

Hal tersebut selaras dengan (Kirana & Havidz, 2020) yang mengemukakan bahwa meskipun DKI Jakarta tergolong ke dalam kota yang memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang tinggi, tetapi masih banyak ditemukannya keterbatasan.

Perlu diperhatikan bahwa pesatnya perkembangan teknologi pembayaran *mobile* dan layanan keuangan alternatif yang dikombinasikan dengan minimnya literasi keuangan dapat memperburuk ketidaksetaraan kekayaan (Lusardi, 2019). Hal terpenting dalam mengedukasi masyarakat mengenai keuangan adalah dengan membekali mereka pengetahuan tentang keuangan sehingga mereka mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah keuangan. Dengan metode ini, mereka dapat menerapkan pengetahuannya untuk mengevaluasi dan menganalisis produk dan layanan keuangan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat (Kirana & Havidz, 2020). Dikarenakan pada dasarnya, literasi keuangan akan mendorong sisi *demand* (masyarakat) mengakses layanan keuangan dalam membangun kesadaran, sedangkan inklusi keuangan mendorong dari sisi *supply* dengan memberikan permintaan masyarakat di layanan jasa keuangan.

Di Indonesia, sejak tahun 2020 hingga 2022 pertumbuhan *digital payment system* terus mengalami peningkatan. Bank Indonesia mencatat, volume dan nilai transaksi *electronic money* pada tahun 2020 mencapai 204 juta transaksi dengan nilai transaksi mencapai Rp 4,6 triliun. Kemudian pada tahun 2021 naik menjadi 293 juta transaksi dengan nilai transaksi mencapai Rp 5,4 triliun. Secara signifikan pada tahun 2022 volume dan nilai transaksi *e-money* menjadi

397 juta transaksi dengan nilai transaksi sebesar Rp 6,8 triliun. Pembayaran digital di Indonesia dengan hampir 70% penduduknya berusia produktif menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Jabodetabek telah berkembang dari awalnya hanya sebuah kota kecil yang berbeda menjadi kota metropolitan yang lebih besar dan lebih terintegrasi. Kawasan ini meliputi Jakarta sebagai pusat kota dan sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Saat ini Jabodetabek telah menjadi kota terbesar di Indonesia dan memegang peranan penting salah satunya dalam bidang ekonomi. Adanya literasi keuangan diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan digital dan oleh karena itu, Peneliti percaya bahwa masih terdapat kesempatan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan adanya keterbatasan daerah Jabodetabek dalam meningkatkan indeks inklusi keuangan digital.

Terdapat beberapa faktor - faktor yang mempunyai pengaruh terhadap inklusi keuangan adalah literasi keuangan, teknologi keuangan (modal sosial), jenis kelamin, usia, pendapatan, dan tingkat pendidikan. Hal tersebut selaras dengan penelitian terhadap 52 negara berkembang yang dilakukan (Khera et al., 2022) yang mengemukakan bahwa inklusi keuangan digital didukung oleh akses infrastruktur, literasi keuangan, dan digital, serta kualitas institusi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel – variabel yang dapat mempengaruhi inklusi keuangan meliputi inklusi keuangan, pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan perilaku keuangan. Aktivitas keuangan tidak dapat dipisahkan dari bagian-bagian yang ada pada literasi keuangan. Sederhananya, literasi keuangan adalah

kemampuan, keterampilan dan keyakinan yang akan berdampak pada pengetahuan, sikap, dan perilaku seseorang yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial. Namun, tidak hanya mempengaruhi pengetahuan mengenai layanan jasa keuangan tetapi juga dapat meningkatkan perilaku keuangan masyarakat dalam upaya mengelola keuangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan individu (Romadhon & Rahmadi, 2020).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Penulis mempunyai keinginan untuk menggali serta mencari informasi lebih mengenai “Determinan *Digital Financial Inclusion* pada Pengguna *Digital Payment* di Jabodetabek”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah *financial knowledge* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *digital financial inclusion* di JABODETABEK?
2. Apakah *financial attitude* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *digital financial inclusion* di JABODETABEK?
3. Apakah *financial behaviour* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *digital financial inclusion* di JABODETABEK?
4. Apakah *financial behaviour* mampu dalam memediasi pengaruh *financial knowledge* terhadap *digital financial inclusion*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *financial knowledge* terhadap *digital financial inclusion* di Jabodetabek.

2. Untuk mengetahui pengaruh *financial attitude* terhadap *digital financial inclusion* di Jabodetabek.
3. Untuk mengetahui pengaruh *financial behaviour* terhadap *digital financial inclusion* di Jabodetabek.
4. Untuk mengetahui kemampuan *financial behaviour* dalam memediasi pengaruh *financial knowledge* terhadap *digital financial inclusion*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan teori keuangan terkait faktor - faktor pendukung inklusi keuangan digital. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan teori keuangan mengenai peran pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan sikap keuangan terhadap pengguna *digital payment*. Penelitian ini dapat digunakan juga sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *digital financial inclusion*.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam menentukan kebijakan bagi para pengambil keputusan atau lembaga keuangan. Dengan mengetahui tingkat pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan sikap keuangan individu, diharapkan para pengambil kebijakan atau lembaga keuangan dapat menentukan strategi agar dapat

meningkatkan penggunaan produk atau layanan lembaga keuangan yang berbasis digital.